The page features a decorative graphic on the right side consisting of three blue circles of varying sizes, each with a lighter blue inner circle, and thin blue lines connecting them. The largest circle is at the top right, a smaller one is in the middle, and another large one is at the bottom right.

Laporan Tahunan

PT BPR MITRA BANARAN MANDIRI

Posisi 31 Desember 2024

Jl. Raya Timur Km 16/9, Banaran, Sambungmacan, Sragen
e-mail : banaranmandiri@gmail.com
Telp : **0351-674188**

LAPORAN TAHUNAN

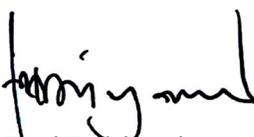
Periode Th. 2024

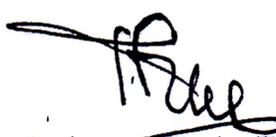
PT. Bank Perekonomian Rakyat
MITRA BANARAN MANDIRI

Sragen, 22 April 2025



Mengetahui dan Menyetujui :


Dwi Indriyane
Komisaris Utama


Sutiman Suryohadi
Komisaris

PERKEMBANGAN USAHA BPR

SEKILAS PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI

PT. Bank Perekonomian Rakyat Mitra Banaran Mandiri (selanjutnya disebut "Bank"), berkedudukan di Jl. Raya Timur KM. 16/9, Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 26 Oktober 1992 oleh Gati Sudardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Purwokerto dan Mengalami perubahan nama berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 11 April 2008 oleh Agung Iriantoro, SH.MH di Jakarta Utara. PT. Bank Perekonomian Rakyat Mitra Banaran Mandiri telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-5978.HT.01.01.TH.1993 tanggal 14 Juli 1993. Bank telah memperoleh ijin usaha sebagai Bank Perekonomian Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor Kep-042/KM.17/1994 tanggal 26 Februari 1994. Bank juga memperoleh Ijin Prinsip dari Bank Indonesia dengan Nomor 26/11/UPBD/PBPR/Slo tanggal 27 April 1993.

Anggaran dasar Bank mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 07 Nopember 2024 dihadapan Notaris Woro Indrijati, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Sragen perihal Perubahan nama PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA BANARAN MANDIRI menjadi PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MITRA BANARAN MANDIRI dan telah mendapatakan Surat Penerimaan Pemberitahuaun Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repiblik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03.0209946 tanggal 12 November 2024.

Maksud dan tujuan berdasarkan dengan pasal 3 Menurut Akta pendirian tersebut, bidang usaha PT. Bank Perekonomian Rakyat Mitra Banaran Mandiri adalah menjalankan usaha dalam bidang Bank Perekonomian Rakyat dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan.
- Memberikan kredit bagi pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan.

BPR Mitra Banaran Mandiri sebagai lembaga keuangan mikro terus melangkah maju dalam memberikan pelayanan kepada UMKM di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Fokus pelayanan yang dilakukan BPR Mitra Banaran Mandiri senantiasa mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat dalam hal simpanan maupun pinjaman.

Menutup tahun 2024, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri sebagian besar tidak mencapai target yang direncanakan namun demikian PT BPR Mitra Banaran Mandiri terus bergerak dinamis melayani masyarakat di tengah kompetisi antar lembaga keuangan yang semakin kompetitif

Sebagai lembaga keuangan mikro, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama di sektor ekonomi kecil dan mikro.

Gambaran

INFORMASI KEPENGURUSAN

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Susunan pengurus Bank berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 07 Nopember 2024 dihadapan Notaris Woro Indrijati, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Sragen perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03.0209946 tanggal 12 November 2024, adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

No	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Dwi Indriyanie, SH
2	Komisaris	Drs. Sutiman Suryohadi, BA

ANGGOTA DIREKSI

No	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	M Tri Setyadi, SE

Susunan Pejabat Eksekutif PT. BPR Mitra Banaran Mandiri periode 31 desember 2024 sebagai berikut :

PEJABAT EKSEKUTIF

No	Jabatan	Nama
1	Kabag. Marketing Kredit	Ari Harjanto
2	Kabag. Remedial	Harsono
3	Kabag. Operasional	Wulansari
4	Kabag. Marketing Dana	Indarti
5	PE. Audit Intern	Tiara Widyastuti
6	PE.Kepatuhan&Manrisk	Amir Al Annas

PROFIL DEWAN KOMISARIS

1 Dwi Indriyanie Komisaris Utama

43 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama PT. BPR Mitra Banaran Mandiri sejak 10 Juni 2019. Ibu Dwi Indriyanie memulai karir di bidang perbankan di PT Bank Yudha Bhakti, Tbk Jakarta sebagai staff unit *Loan Review – Departemen credit Suport* (November 2004 – November 2005), pada bank yang sama pernah menjabat sebagai *staf Unit Legal & Dokumentasi* (November 2005 – Mei 2010), sebagai *Kepala Unit Biro Direksi – Corporate Secretary* (Mei 2010 – Des 2018), menjabat sebagai *Kepala Departemen Corporate Secretary* (Des 2018 – 2019). Selain berkarir di bidang Perbankan, yang bersangkutan juga pengurus Koperasi Karyawan (Kopkar) Bank Yudha Bhakti dari bulan Desember 2011 s/d sekarang.

Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 2003 dan telah memenuhi persyaratan kompetensi (berkompeten) untuk kualifikasi komisaris pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada tahun 2017.

2 Sutiman Suryohadi Komisaris

75 tahun, menjabat sebagai Komisaris PT. BPR Mitra Banaran Mandiri sejak tahun 2002 Beliau memulai karir di lembaga keuangan sejak tahun 2002 sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Banaran. Sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua KUD Banaran.

Beliau berkecimpung di dunia pendidikan sejak tahun 1968 diawali sebagai guru SMP Sidoharjo, Sragen (1968 – 1997), sebagai Kepala Sekolah di SMP Sambirejo, Sragen (1997 – 2002) sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 4 Sragen (2002 – 2009). Menamatkan pendidikan Sarjana (S-1) jurusan Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Memenuhi persyaratan kompetensi (berkompeten) untuk kualifikasi Komisaris pada Bidang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

PROFIL DIREKSI

1 M. Tri Setyadi Direktur YMF Kepatuhan

45 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR Mitra Banaran Mandiri sejak Oktober 2024 sebelumnya sebagai Direktur PT. BPR Mitra Banaran Mandiri Sragen sejak 31 Oktober 2014. Memulai karir di bidang lembaga keuangan sejak tahun 2004 sebagai *Staff Marketing* di PT BPR Mitra Banaran Mandiri, Sragen (2004 s/d 2014). Sebelum bergabung dengan PT. BPR Mitra Banaran Mandiri, yang bersangkutan pernah bekerja di PT Indografika Surakarta sebagai *Personalia dan General Affair* dari tahun 2003 s/d 2004.

Menamatkan *Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen* dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo pada tahun 2002.

Memenuhi persyaratan kompetensi (berkompeten) untuk kualifikasi Direktur pada Bidang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada tahun 2014.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

1 Ari Harjanto Kepala Bagian Kredit

43 tahun, menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing Kredit PT. BPR Mitra Banaran Mandiri sejak bulan maret 2024. Memulai karir di PT BPR Mitra Banaran Mandiri sejak tahun 2018 sebagai Staf marketing. Sebelum berrkarya di PT BPR Mitra Banaran Mandiri yang bersangkutan pernah bekerja di bidang keuangan sebagai Account Officer pada PT. BPR Trihasta Prasodjo tahun 2006 s/d 2007, KSU Purna Yudha Surakarta dari tahun 2007 s/d 2011 sebagai account officer, PT Bank Pundi Indonesia,Tbk sebagai Account Officer dari tahun 2012 s/d 2016, PT Bess Finance Divisi UKM sebagai Head Marketing tahun 2016 s/d 2018.

Menamatkan pendidikan terakhir dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIES) pada tahun 2006, yang bersangkutan memenuhi persyaratan kompetensi (berkompeten) untuk kualifikasi Pejabat Eksekutif sebagai Kepala Bagian Marketing Kredit pada PT BPR Mitra Banaran Mandiri.

2 Harsono Kepala Bagian Kredit

44 tahun, menjabat sebagai Kepala Bagian Remedial PT. BPR Mitra Banaran Mandiri sejak bulan Februari 2019. Memulai karir di bidang lembaga keuangan sebagai *Marketing Funding* di PT BPR Mitra Banaran Mandiri mulai tahun 2004 – 2010. Yang bersangkutan kemudian bekerja di bagian *Marketing Kredit* dari tahun 2010 – 2019.

Sebelum bekerja di PT BPR Mitra Banaran Mandiri, pernah bekerja di PT CCI Bintang dengan jabatan sebagai Production Technician dan pernah bekerja sebagai karyawan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Jasa Mulia Sragen. Menamatkan pendidikan Ahli Madya (Amd) di Politeknik Negeri Semarang pada tahun 2002. Memenuhi persyaratan kompetensi (berkompeten) untuk kualifikasi Pejabat Eksekutif sebagai Kepala Bagian Remedial pada PT BPR Mitra Banaran Mandiri.

3 Wulansari Kepala Bagian Operasional

30 tahun, menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional PT. BPR Mitra Banaran Mandiri sejak 01 Februari 2019. Memulai karir di bidang lembaga keuangan sebagai Staf Pelaporan di BPR Mitra Banaran Mandiri pada tahun 2017-2019.

Sebelum bergabung dengan PT BPR Mitra Banaran Mandiri yang bersangkutan pernah bekerja di BMT Bus dan PT Pan Brothers, Tbk. Menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu (STTR Cepu) program studi Teknik Elektro pada tahun 2016. Memenuhi persyaratan kompetensi (berkompeten) untuk kualifikasi Pejabat Eksekutif sebagai Kepala Bagian Operasional pada PT BPR Mitra Banaran Mandiri.

4 Indarti Kepala Bagian Dana

47 tahun, menjabat sebagai Kepala Bagian Dana di PT. BPR Mitra Banaran Mandiri sejak 01 Juli 2018. Memulai karir di bidang lembaga keuangan sebagai Marketing Funding di BPR Bali Banaran Mandiri (2004 S/D 2010). Pada tahun 2010 ditugaskan sebagai Teller, kemudian Tahun 2014 ditugaskan kembali sebagai staf Marketing dana hingga bulan Juni 2018.

Menamatkan pendidikan terakhir dari Politeknik Muhammadiyah Karanganyar pada tahun 1999, yang bersangkutan memenuhi persyaratan kompetensi (berkompeten) untuk kualifikasi Pejabat Eksekutif sebagai Kepala Bagian Dana pada PT BPR Mitra Banaran Mandiri.

5 Tiara Widyastuti PE Audit Intern

31 tahun, menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Audit Intern PT. BPR Mitra Banaran Mandiri sejak bulan Februari 2019. Memulai karir sebagai staff teller di BPR Mitra Banaran Mandiri pada tahun 2017 – 2019. Menjabat sebagai PE Audit Intern tahun 2019 – Sekarang. Sebelum bekerja di PT BPR Mitra Banaran Mandiri, yang bersangkutan pernah bekerja di PT Bank Danamon dari tahun 2012 – 2014 sebagai Loan Admin. Kemudian pada tahun 2014 – 2017 bekerja di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai kasir unit.

Menamatkan pendidikan terakhir di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) ASMI Solo dengan program studi Administrasi Negara pada tahun 2015. Memenuhi persyaratan kompetensi (berkompeten) untuk kualifikasi Pejabat Eksekutif sebagai Pejabat Audit Internal PT BPR Mitra Banaran Mandiri

6 Amir Al Annas PE Kepatuhan & Manrisk

47 tahun, menjabat sebagai Pejabat Eksekutif PT. BPR Mitra Banaran Mandiri sejak 2014. Memulai karir di bidang lembaga keuangan sebagai Marketing di BPR Bali Banaran Mandiri (2004 – 2006), sebagai Teller (2006-2007), sebagai Loan dan Pelaporan (2007-2008), sebagai Remedial dan Pelaporan (2008-2014), sebagai PE SPI (2014-2017).

Menamatkan pendidikan terakhir di DIII di Universitas Brawijaya jurusan Teknik Komputer. Memenuhi persyaratan kompetensi (berkompeten) untuk kualifikasi Pejabat Eksekutif sebagai PE Kepatuhan & Manrisk pada PT BPR Mitra Banaran Mandiri

KEPEMILIKAN SAHAM

Kepemilikan Saham per 31 Desember 2024 ;

No	Pemegang Saham	Modal Disetor	Komposisi
1	KOPKAR BANK YUDHA BHAKTI	1.320.000.000	60%
2	KUD BANARAN	880.000.000	40%
Jumlah		2.200.000.000	100%

Kepemilikan Saham oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam kelompok usaha BPR :

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	M. Tri Setyadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0	0

Catatan : Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	M. Tri Setyadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	-	Tidak Ada	-

Catatan : Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain

3. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dwi Indriyanie	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0	0
2	Sutiman Suryohadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0	0

Catatan : Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR.

4. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dwi Indriyanie	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	Tidak Ada	-
2	Sutiman Suryohadi	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	Tidak Ada	-

Catatan : Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain,

INFORMASI KETERKAITAN ANTAR PEMEGANG SAHAM

Keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 ;

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	M. Tri Setyadi	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	M. Tri Setyadi	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwi Indriyanie	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sutiman Suryohadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

4. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwi Indriyanie	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sutiman Suryohadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kantor Akuntan Publik yang mengaudit PT BPR Mitra Banaran Mandiri Tahun Buku 2024 :

No	Nama AP	Nama KAP	Alamat KAP	Audit ke
1.	Dr. Kurnia, Ak., CA., CPA	Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan	Jl. Boulevard Tarn Blok. O2 Np. 50 Citra Gran, Cibubur, Bekasi - 17435	1

AKTIVITAS UTAMA

Bidang usaha PT. BPR Mitra Banaran Mandiri adalah menjalankan usaha dalam bidang Bank Perekonomian Rakyat dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- ✓ menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan.
- ✓ Memberikan kredit bagi pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan.

Dan selama tahun 2024 PT. BPR Mitra Banaran Mandiri masih konsisten dengan usaha / aktivitas utama tersebut.

JARINGAN KERJA DAN MITRA USAHA

Jaringan kerja dan mitra usaha PT. BPR Mitra Banaran Mandiri selama tahun 2024 lebih pada kerjasama dalam bentuk *linkage program* dengan bank umum dalam bentuk pinjaman serta penempatan deposito.

Adapun mitra usaha BPR selama tahun 2024 antara lain : Bank Danamon, Bank Jatim dan Bank Jateng.

JUMLAH, JENIS DAN LOKASI KANTOR

Selama tahun 2024 PT BPR Mitra Banaran Mandiri beroperasi dengan 2 (dua) kantor yaitu kantor pusat dan kantor kas sebagai berikut :

No	Jenis	Lokasi	Jumlah
1	Kantor Pusat	Jl. Raya Timur KM 16/9 Banaran, Sambungmacan, Sragen	1
2	Kantor Kas	Jl Raya A. Yani no 68 gendingan, sragen tengah	1
3	Kantor Kas	Jl Raya Sukodono, Pasar pojok, majenang, Sukodono, Sragen	1

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Selama tahun 2024 PT. BPR Mitra Banaran Mandiri memiliki Sumber Daya manusia sebanyak 33 orang terdiri dari :

- 2 orang dewan Komisaris
 - 1 orang direksi
 - 16 orang petugas lapangan (*marketing dana, marketing kredit dan remedial*)
 - 14 orang staf operasional support.
-

TINGKAT PENDIDIKAN SDM

TINGKAT PENDIDIKAN SDM			
PT BPR MITRA BANARAN MANDIRI			
NO	NAMA KARYAWAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JOBDESC
1	DWI INDRIYANIE	S1	KOMISARIS UTAMA
2	SUTIMAN SURYOHADI	S1	KOMISARIS
3	M TRI SETYADI	S1	DIREKTUR UTAMA
4	DWI HARTANTI	S1	LEGAL
5	AMIR AL ANNAS	D3	PE KEP&MANRISK
6	INDARTI	S1	KABAG MARKETING DANA
7	HARSONO	D3	KABAG REMEDIAL
8	MUHAMMAD ACHMAD	D3	REMEDIAL
9	RUTH WENNY LESTARININGSIH	S1	LOAN ADMIN
10	ANNUR IDHAYATI	S1	MARKETING DANA
11	HANANTO KURNIADI	S1	REMEDIAL
12	LILIS SUSILOWATI	S1	MARKETING KREDIT
13	WULANSARI	S1	KABAG OPERASIONAL
14	GUNAWAN WIBISONO	D3	REMEDIAL
15	DEWANGGA ADI PRASETYO	SMA	APPRAISAL
16	AFYUDHIN PRIMAYUSMAN	S1	ANALIS KREDIT
17	TIARA WIDYASTUTI	S1	PE AI
18	WAHYU DWI SUSANTO	S1	REMEDIAL
19	DESSY PUSPITASARI RAHARJO	D3	PEMBUKUAN
20	JOKO PORWANTO	SMA	REMEDIAL
21	SILVANA ANGGRAINI	S1	MARKETING DANA
22	NANANG HARIYONO	S1	REMEDIAL
23	ARI HARJANTO	S1	KABAG MARKETING KREDIT
24	DESI PRATAMAWATI	S1	TELLER
25	VIOLINA YOLANDA	S1	TELLER
26	APRILIA PUTRI WULANDARI	S1	MARKETING DANA
27	WAHYU PUTRA WIRAWAN	S1	MARKETING KREDIT
28	WULAN SURI RATIH	S1	TELLER
29	SURYANINGSIH	S1	TABUNGAN&DEPOSITO
30	SANTRI APRILIASARI	S1	TELLER
31	ZERLY MANDASARI	S1	CUSTOMER SERVICE
32	SLAMET SETYAWAN	S1	MARKETING KREDIT
33	ENNO NAFENDA M	S1	MARKETING DANA

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri selama tahun 2024 telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain : Mengikuti training (*karyawan dan direksi*), dan Sosialisasi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

KEBIJAKAN GAJI DAN FASILITAS KEPADA PENGURUS

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 dalam hal kebijakan pemberian gaji/honor dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Bonus putusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PERUBAHAN – PERUBAHAN PENTING LAINNYA

Anggaran dasar Bank mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 07 Nopember 2024 dihadapan Notaris Woro Indrijati, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Sragen perihal Perubahan nama PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA BANARAN MANDIRI menjadi PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MITRA BANARAN MANDIRI dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03.0209946 tanggal 12 November 2024.

LAPORAN MANAJEMEN

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Keterangan	2024	2023	2022	2021	2020
LAPORAN LABA RUGI					
(dalam ribuan rupiah)					
PENDAPATAN OPERASIONAL	6.908.158	6.994.952	8.218.994	7.500.731	8.540.772
BEBAN OPERASIONAL	6.497.468	5.843.915	6.463.033	6.232.456	6.659.481
PENDAPATAN NON OPERASIONAL	45.810	101.239	0	49.499	52.070
BEBAN NON OPERASIONAL	0	0	(21.943)	0	(66.672)
LABA SEBELUM PAJAK	456.499	1.252.276	1.734.018	1.317.774	1.866.689
TAKSIRAN PPh	62.995	154.519	324.869	222.357	328.646
LABA BERSIH	393.504	1.097.757	1.409.149	1.095.417	1.538.043
NERACA					
ANTAR BANK AKTIVA	16.790.562	13.428.154	13.943.864	13.956.695	14.327.199
KREDIT YANG DIBERIKAN	27.883.046	29.676.532	30.389.052	28.927.135	29.593.668
AKTIVA TETAP (NET)	411.759	452.649	477.416	513.725	477.171
AKTIVA LAINNYA	217.349	352.736	112.144	167.932	394.769
DANA PIHAK KETIGA	21.584.785	22.312.022	22.522.662	20.247.406	18.446.923
ANTAR BANK PASIVA (TAB + DEP & PINJ)	14.479.731	11.977.971	12.590.829	14.616.965	17.668.719
MODAL	9.230.972	9.687.468	9.589.711	8.680.562	8.385.145
JUMLAH ASSET	45.673.884	44.588.074	45.775.837	44.389.564	45.790.002

RASIO KEUANGAN

Keterangan	2024	2023	2022	2021	2020
RASIO KEUANGAN	(dalam %)				
Kualitas Aktiva Produktif (KAP) – Gross	11,43	8,92	4,47	3,33	2,72
Non Performance Loan (NPL) – Netto	9,95	7,89	4,17	4,07	2,75
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum - (KPMM)	47,96	52,83	52,96	47,87	45,77
Loan to Deposit Ratio (LDR)	130,30	75,13	73,90	74,52	77,50
Return on Asset (ROA)	0,97	2,75	3,79	2,92	4,20
Cash Ratio	52,68	42,60	42,09	47,37	46,04
PPAP	100,03	105,20	100,10	100,38	146,09
BOPO	93,44	82,35	78,91	82,55	77,74

Dari data di atas Ratio Non Performing Loan masih relative tinggi yaitu sebesar 20.38% atau sebesar 5.732.655.850 dari total Kredit yang diberikan sebesar 28.127.966.383 dengan rincian :

Lancar	12.303.986.391
Dalam Perhatian Khusus	10.091.324.141
Kurang Lancar	590.436.641
Diragukan	1.218.181.415
Macet	3.924.037.794

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas kredit menjadi bermasalah yang diantaranya adalah mengalami penurunan omzet usaha, konflik rumah tangga debitur, terkena musibah serta kondisi keuangan yang menurun akibat dari usaha yang tidak jalan.

Terkait kondisi rasio NPL (Gross) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **20,38 %** dari target RBB yang sebesar **5,12 %**. Hal ini perlu perhatian yang sangat serius untuk BPR agar dapat senantiasa mengelola risiko dengan baik. Tingkat rasio NPL yang sangat tinggi dapat memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap pos-pos keuangan penting lainnya, ditambah dengan pertumbuhan bisnis yang cenderung terus menurun, akan semakin memperburuk kinerja BPR. Dari tren saat ini dan memperhatikan tingginya jumlah kredit dalam perhatian khusus maka sangat mungkin terjadi pemburukan lebih lanjut kedepan, dan hal ini perlu diantisipasi secara luar biasa.

BPR selalu berupaya mengambil langkah-langkah perbaikan agar tidak terjadi pemburukan rasio dan nominal NPL, sehingga tidak terjadi penurunan kualitas lebih lanjut. Perbaikan NPL dan pemulihan CKPN sangat berarti dan membawa dampak signifikan terhadap perbaikan kinerja BPR. BPR Mitra Banaran Mandiri akan melakukan penguatan personil khususnya bagian penagihan, dan menjalankan strategi agar tim yang ada dapat secara efektif membawa perbaikan bagi kinerja BPR.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN BPR

PT. BPR Mitra Banaran Mandiri melangkah maju sebagai lembaga keuangan mikro selama kurang lebih 31 tahun. Seiring dengan langkah tersebut, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri tetap fokus pada inti bisnis yang beroperasi sejak 1994 yaitu sebagai penyedia jasa keuangan berupa kredit kepada sektor ekonomi mikro dan kecil dan menjadi salah satu bagian dari lembaga keuangan mikro di wilayah Sragen dalam pelayanannya kepada masyarakat terutama sektor ekonomi mikro hingga saat ini.

Selama tahun 2024, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri telah mengambil beberapa kebijakan yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja perseroan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Disamping meneruskan kebijakan yang masih relevan pada tahun sebelumnya untuk dilaksanakan pada tahun 2024, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri juga mengambil langkah-langkah kebijakan baru. Adapun secara ringkas kebijakan yang ditempuh oleh PT. BPR Mitra Banaran Mandiri selama tahun 2024 antara lain adalah sebagai berikut :

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

Selama tahun 2024, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri telah menyalurkan produk dalam hal penghimpunan dana kepada pihak ketiga. Adapun produk penghimpunan dana pihak ketiga yang dimiliki BPR saat ini adalah : Tabungan Mandiri, Tabungan Poin, Tabungan Unggul, serta Deposito. Dalam penyaluran kredit selama tahun 2024, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri menggunakan produk-produk seperti kredit umum yang berupa Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumtif. Untuk menginformasikan produk-produk tersebut kepada masyarakat agar lebih dikenal dan pada akhirnya menggunakan produk tersebut, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri menggunakan strategi sebagai berikut :

- Mencari database daerah pemasaran yang akan dituju dengan meliputi kondisi perekonomian masyarakat setempat, karakteristik masyarakat setempat maupun harapan-harapan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang ada.
 - Mengumpulkan *database* nasabah lama yang sudah lunas maupun *existing* untuk penawaran fasilitas kredit di BPR supaya bisa bergabung kembali menjadi nasabah BPR.
 - Mendata tingkat persaingan sesama lembaga keuangan serta mengevaluasi kebijakan yang ada.
 - Memberikan target kepada masing-masing marketing baik dalam pencapaian penghimpunan sumber dana maupun pembiayaan kredit.
 - Memertahankan prinsip kehati-hatian serta pembinaan secara berkala kepada nasabah.
-

PENGUATAN MODAL

Strategi penguatan modal mencakup berbagai pendekatan untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan. Ini bisa berupa meningkatkan modal ekuitas, mencari pendanaan eksternal, mengelola aset dengan efisien, atau meningkatkan rasio kecukupan modal.

STRATEGI PEMASARAN

Tahun 2024 Tim Pemasaran telah menyampaikan promosi-promosi kepada nasabah existing dan juga calon nasabah baru. Hal ini diharapkan akan berdampak terhadap pertumbuhan NOA baru dan juga memperluas segmen pasar. Menambah inovasi untuk Tim Funding atas produk-produk simpanan, sehingga dapat meningkatkan jumlah dana pihak ketiga di tahun 2025 sesuai dengan target yang ditetapkan. Jatuh tempo tabungan poin sepanjang tahun 2025 juga agar diwaspadai dan agar tim funding dapat secara maksimal menjaga tingkat likuiditas BPR di level yang aman.

PENGENDALIAN BOPO

Selama tahun 2024, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri senantiasa mengendalikan / mengoptimalkan rasio BOPO (*Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan operasional*). Pengendalian BOPO merupakan langkah penting untuk menghindari pemborosan yang tidak perlu.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komponen terpenting bagi PT. BPR Mitra Banaran Mandiri, untuk itu Sumber Daya Manusia mendapatkan perhatian cukup besar baik dalam hal peningkatan kemampuan (*skill*), optimalisasi pelaksanaan tugas (*rotasi*) maupun penyegaran (*motivasi*). Dalam hal peningkatan kemampuan/ skill SDM, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri telah mengutus beberapa karyawan untuk menjalani training yang diselenggarakan oleh Perbarindo dan Lembaga Pelatihan lainnya via *online*, disamping itu juga dilakukan sosialisasi ketentuan yang berlaku dan penyegaran (*motivasi*) dalam rangkaian kegiatan *outbond*. Dalam rangka optimalisasi kinerja masing-masing karyawan, PT. BPR Mitra Banaran berupaya untuk melakukan evaluasi dan rotasi tugas kepada karyawan dengan harapan disamping untuk mengurangi kejenuhan juga bisa menekan tingkat risiko pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.

MANAJEMEN RISIKO

Sebagai bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit kepada sektor ekonomi mikro dan kecil, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri memiliki portofolio aset yang didominasi oleh kredit yang diberikan. Menilik kondisi tersebut, kinerja PT. BPR Mitra Banaran Mandiri sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di wilayah dimana bank beroperasi maupun perekonomian nasional. Penyaluran pinjaman diberikan merupakan urat nadi dari bisnis BPR serta sumber utama pendapatan, penurunan tingkat pinjaman diberikan dan juga kurang optimalnya strategi bisnis menjadi hambatan dalam perolehan laba.

Untuk meminimalkan dampak negatif tersebut PT. BPR Mitra Banaran Mandiri telah berupaya melakukan pengelolaan risiko dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan

keputusan, dengan demikian diharapkan bisa meningkatkan kinerja bank yang sehat dan berkesinambungan.

RISIKO KREDIT

Pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan. Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Tahun 2024 kondisi ekonomi Indonesia mengalami penurunan hal ini mengakibatkan dampak negative pada pertumbuhan kredit yang diberikan, peningkatan resiko kredit, dan gangguan operasi bisnis.

Informasi lainnya terkait rencana bisnis BPR yaitu upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah karena masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, hal ini terlihat NPL masih dibawah kategori sehat. Hal ini tercermin dari pencapaian tingkat *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* per 31 Desember 2024 sebesar 20,38 % dimana masih di bawah ketentuan maksimal OJK yaitu sebesar 5%.

Walaupun belum mencapai target RBB yang telah ditetapkan, namun ditengah tantangan yang dihadapi BPR, pencapaian tersebut patut disyukuri dimana BPR masih dapat berjalan dengan baik dan tetap menjaga prinsip – prinsip perbankan yang sehat.

Adapun untuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam bidang risiko kredit telah berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu melalui pemantauan dan penilaian atas *Laporan Performance* yang disajikan setiap bulan. Untuk Pemantauan risiko kredit dilakukan secara berkala oleh Direksi baik dari proses pemberian kredit sampai dengan berakhirnya kredit. Pemantauan tersebut meliputi semua aspek baik dari sisi kepatuhan terhadap persyaratan, kecukupan agunan sampai dengan penanganan kredit bermasalah.

Berdasarkan laporan profil risiko tahun 2024 yang telah dianalisa didapatkan untuk peringkat risiko inhern kredit berada pada peringkat 3 (cukup rendah), peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada pada peringkat 2 (memadai), dan peringkat tingkat risiko berada pada peringkat 2 (rendah) dengan secara keseluruhan predikat risiko kredit pada bulan Semester 2 Tahun 2024 adalah peringkat **2 (rendah)**, dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko berada pada peringkat **2 (memadai)**. Tetap menjadi perhatian pada bagian bisnis untuk kredit kualitas rendah pada komposisi kredit restrukturisasi yang berada di kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus).

RISIKO OPERASIONAL

Dalam mengidentifikasi risiko operasional, Direksi telah melakukan simulasi perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar berupa Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Dalam pemantauan risiko operasional, Direksi bersama PE Audit Internal melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktifitas dan memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif.

Namun demikian pengendalian risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja PT. BPR Mitra Banaran Mandiri.

Berdasarkan laporan profil risiko tahun 2024 yang telah dianalisa didapatkan untuk peringkat risiko intern operasional berada pada peringkat 2 (rendah), peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada pada peringkat 2 (memadai), dan peringkat tingkat risiko berada pada peringkat 2 (rendah) dengan secara keseluruhan predikat risiko operasional pada bulan Semester 2 Tahun 2024 adalah peringkat **2 (rendah)**, dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko berada pada peringkat **2 (memadai)**.

RISIKO LIKUIDITAS

Posisi dana pihak ketiga, likuiditas aset, kewajiban kepada pihak lain dan komitmen kredit kepada debitur merupakan potensi risiko likuiditas bagi PT. BPR Mitra Banaran Mandiri. Ketidakmampuan untuk menghimpun dana dengan biaya wajar akan berdampak kepada profitabilitas. Maka PT. BPR Mitra Banaran Mandiri telah berupaya mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Pengelolaan risiko likuiditas mencakup antara lain pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, penetapan strategi pendanaan serta memelihara deposito yang sudah ada. Likuiditas PT. BPR Mitra Banaran Mandiri saat ini diukur dari *cash ratio* dan *current ratio*. Bank memelihara *likuiditas* tersebut untuk memenuhi kebutuhan operasional harian serta sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas penarikan dana tidak terduga. PT. BPR Mitra Banaran Mandiri memelihara *likuiditas* dalam bentuk kas, giro dan tabungan pada bank umum serta deposito jangka pendek baik pada bank umum maupun pada BPR lain.

Berdasarkan laporan profil risiko tahun 2024 yang telah dianalisa didapatkan untuk peringkat risiko intern Likuiditas berada pada peringkat 2 (rendah), peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada pada peringkat 3 (cukup memadai), dan peringkat tingkat risiko berada pada peringkat 2 (rendah) dengan secara keseluruhan predikat risiko TKS pada bulan Juni 2024 adalah peringkat **2 (rendah)**, dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko berada pada peringkat **2 (memadai)**.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum. Risiko Kepatuhan dapat disebabkan antara lain oleh perilaku hukum yang meliputi tiga unsur yaitu kesengajaan, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan serta perilaku keorganisasian yang dipengaruhi oleh faktor profil bisnis, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor sosiologis.

Berdasarkan laporan profil risiko tahun 2024 yang telah dianalisa didapatkan untuk peringkat risiko intern kepatuhan berada pada peringkat 2 (rendah), peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada pada peringkat 2 (memadai), dan peringkat tingkat risiko berada pada peringkat 2 (rendah) dengan secara keseluruhan predikat risiko kepatuhan pada bulan Desember 2024 adalah peringkat **2 (rendah)**, dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko berada pada peringkat **2 (memadai)**.

Dari uraian diatas Peringkat risiko dalam laporan Profil Risiko didapatkan hasil 2 rendah. Hal ini didapatkan dari nilai tingkat risiko Kredit bernilai 2, nilai tingkat risiko operasional, nilai tingkat risiko kepatuhan 2 dan nilai tingkat risiko likuiditas 2. Untuk penetapan Limit risiko sudah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 13/ SK-DIR/XI/2023 Perihal Penetapan Limit risiko Risk Appatite dan Risk Tolerance BPR

PELAKSANAAN *GOOD COORPORATE GOVERMANCE (GCG)*

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sudah menjadi bagian dari PT. BPR Mitra Banaran Mandiri sejak berdiri dan terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu.

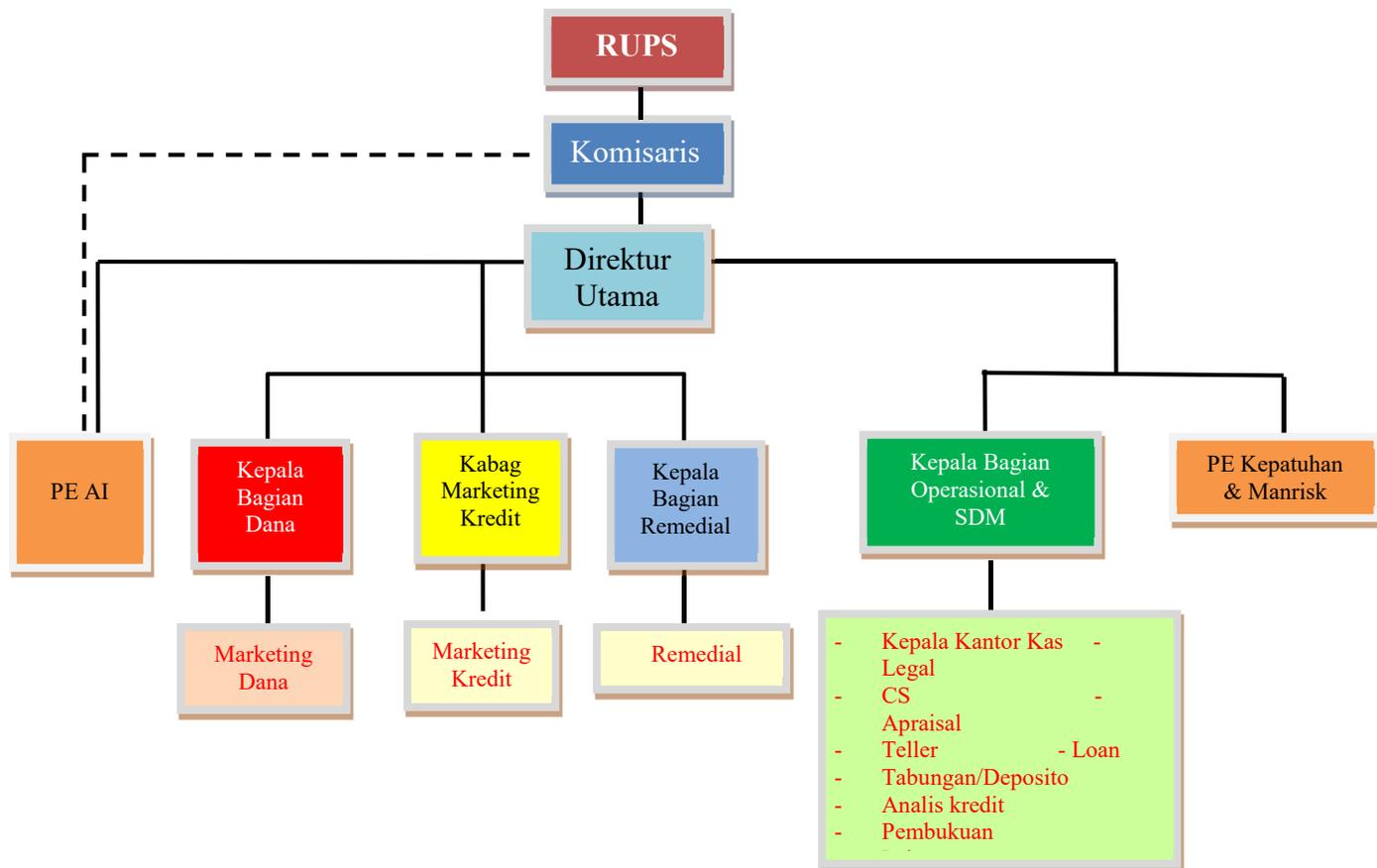
Bagi PT. BPR Mitra Banaran Mandiri, tata kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam menjalankan bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Manfaat yang dapat diambil dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi PT. BPR Mitra Banaran Mandiri antara lain memperkuat posisi daya saing BPR, dan pencapaian target dalam rencana kerja yg dijadikan indikator keberhasilan PT. BPR Mitra Banaran Mandiri.

Bagi PT. BPR Mitra Banaran Mandiri, tujuan penerapan praktik GCG tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan terhadap peraturan Pemerintah saja, namun lebih kepada untuk memfasilitasi pengurus dan karyawan agar bekerja secara optimal yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai perusahaan (value creation).

Pada tahun 2024 BPR Mitra Banaran Mandiri telah melakukan Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap penerapan Tata Kelola BPR. Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola yang didapatkan adalah Peringkat Komposit Cukup Baik dengan Nilai Komposit 2,99 yaitu memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukan dengan hasil yang cukup memadai.

STRUKTUR ORGANISASI



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Utama PT. BPR Mitra Banaran Mandiri yang memegang kekuasaan dan mempunyai wewenang tertinggi. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan forum dimana Direksi dan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja BPR kepada pemegang saham. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi, menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi serta mengevaluasi kinerja Komisaris dan Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Dewan komisaris PT. BPR Mitra Banaran Mandiri terdiri dari 2 anggota yaitu Komisaris Utama dan Komisaris, yang mana pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS setelah dinyatakan disetujui oleh OJK setelah sebelumnya dilakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) Bank Perencanaan Rakyat.

Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Mitra Banaran Mandiri secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Komisaris dengan Direksi, auditor eksternal dan otoritas pengawas bank.

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan wajib melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perundang-undangan, anggaran dasar dan *prudential banking practices*.

DIREKSI

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 20/POJK.03/2014 Direksi diangkat melalui RUPS setelah **mendapatkan persetujuan OJK** melalui *fit and proper test*. Direksi juga diwajibkan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi. Saat ini seluruh Direksi PT. BPR Mitra Banaran Mandiri telah memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi.

Sebagai implementasi dari UU Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Perseroan khususnya mengenai Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, selama tahun 2024 Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Direksi melakukan kepengurusan PT. BPR Mitra Banaran Mandiri dengan penuh tanggung jawab.
- Direksi dalam mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi dalam setiap kegiatan usaha Bank melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Direksi selalu menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemenuhan kekosongan posisi Direktur akan menjadi fokus di tahun 2025, dengan perekrutan secara optimal, baik dari eksternal dan juga promosi dari internal.

PE AUDIT INTERN

PE Audit Intern memiliki peran sangat penting untuk ikut membantu dalam mewujudkan sistem pengendalian internal BPR, sehingga profesionalisme Satuan Pengawas Intern dalam melaksanakan tugasnya diharapkan bisa mendukung peningkatan kinerja PT. BPR Mitra Banaran Mandiri.

Adapun misi PE Audit Intern adalah sebagai berikut :

- Menjadi mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah pada proses bisnis perusahaan.
 - Membantu manajemen mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan.
 - Mendorong manajemen dalam meningkatkan penerapan *Good Corporate Governace (GCG)*
-

TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

AKTIVITAS OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) memungkinkan bank menjalankan kegiatan operasional yang semakin kompleks. Operasional TI tidak hanya terkonsentrasi di pusat data (Data Center) tetapi juga pada aktivitas lainnya yang terkait dengan penggunaan aplikasi yang terintegrasi, beragam media komunikasi, koneksi internet, dan berbagai platform komputer. Sementara itu akses input dan output dapat dilakukan oleh banyak user dari berbagai lokasi. Demikian juga dengan pemrosesan, dapat dilakukan di berbagai lokasi yang berjauhan namun saling terkait, baik secara online realtime, on-line, maupun off-line. Oleh karena itu diperlukan pengendalian yang memadai atas operasional TI agar bank dapat meminimalisasi risiko terganggunya kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

Pengaturan atas aktivitas operasional TI yang memadai sangat penting untuk memastikan informasi pada sistem komputer adalah lengkap, akurat, terkini, terjaga integritasnya, dan handal, serta terhindar dari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan perusakan data.

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Manajemen

Manajemen Bank bertanggung jawab untuk memastikan mekanisme operasional TI yang stabil, aman, dan efisien secara keseluruhan, baik yang diselenggarakan sendiri maupun menggunakan jasa pihak lain. Manajemen harus menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur operasional TI yang menjamin kesinambungan operasional TI Bank dan memastikan penerapannya baik pada satuan kerja penyelenggara TI atau pihak penyedia jasa maupun pada satuan kerja pengguna TI. Kesalahan atau kegagalan yang terjadi pada aktivitas operasional TI dapat mengganggu kegiatan operasional dan pelayanan bank kepada nasabah yang pada akhirnya mempengaruhi reputasi bank. Oleh karena itu manajemen harus memastikan penilaian risiko dilakukan secara berkala pada aktivitas operasional TI dan memutuskan penanganan risiko potensial yang tepat sesuai dengan risk appetite yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan Dan Prosedur

Bank wajib memiliki kebijakan yang mencakup setiap aspek operasional TI. Kedalaman dan cakupan kebijakan tersebut disesuaikan dengan kompleksitas operasional TI Bank.

3. Kebijakan Operasional Data Center

Kebijakan, sistem dan prosedur serta standar yang diterapkan dalam aktivitas operasional Data Center mencakup aktivitas menjalankan tugas rutin maupun nonrutin.

Aktivitas yang terkait dengan operasional Data Center antara lain:

- a. penjadwalan tugas: Bank wajib memiliki dan melaksanakan jadwal semua tugas yang harus dijalankan di Data Center operasional TI efektif dan aman dari perubahan yang tidak sah.
-

- b. pengoperasian tugas: pemberian akses command line kepada operator TI harus dibatasi sesuai kewenangan pada fungsi pengoperasian tugas yang telah ditentukan.
- c. pendistribusian laporan/output: Hasil informasi yang diproduksi oleh sistem (output), dalam bentuk softcopy atau hardcopy, dapat merupakan informasi yang sensitif atau rahasia. Prosedur yang harus dimiliki Bank meliputi penentuan informasi yang akan diproduksi, pendistribusian output baik secara fisik maupun logik dan pemusnahan output yang sudah tidak diperlukan lagi. Prosedur tersebut diperlukan untuk menghindari terbukanya informasi yang bersifat rahasia dan meningkatnya biaya akibat adanya output yang tidak diperlukan, dan untuk dapat memastikan keamanan output.
- d. proses backup baik on-site maupun off-site, restore, download dan upload untuk data/database;
- e. pengaktifan jejak audit (audit trail).

4. Kebijakan Perencanaan Kapasitas

Bank perlu memiliki kebijakan dan prosedur perencanaan kapasitas untuk dapat memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan Bank telah sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis dan mengantisipasi perkembangan usaha Bank. Tanpa perencanaan kapasitas yang baik, Bank dapat menghadapi risiko kekurangan atau bahkan pemborosan sumber daya TI. Perencanaan kapasitas hendaknya disusun untuk jangka waktu cukup panjang dan selalu dikinikan untuk mengakomodir perubahan yang ada.

5. Kebijakan Pengelolaan Konfigurasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Bank harus menetapkan prosedur terkait:

- a. proses instalasi perangkat keras dan perangkat lunak;
- b. pengaturan parameter (hardening) perangkat keras dan perangkat lunak;
- c. inventarisasi dan pengkinian informasi perangkat keras dan perangkat lunak, perangkat jaringan, media penyimpan dan perangkat pendukung lainnya yang terdapat di Data Center.

6. Kebijakan Pemeliharaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

7. Perawatan Perangkat Keras dan Fasilitas Data Center

Perawatan preventif secara berkala terhadap peralatan TI perlu dilakukan untuk meminimalkan kegagalan pengoperasian peralatan tersebut dan untuk mendeteksi secara dini permasalahan yang potensial. Untuk itu bank perlu memiliki kontrak perawatan dengan vendor guna memastikan ketersediaan dukungan perawatan dari vendor. Semua perawatan yang dilakukan hendaknya didasarkan jadwal yang telah ditetapkan, didokumentasikan pada suatu log dan dilakukan review secara berkala.

8. Pengamanan Fisik dan Pengendalian Lingkungan Data Center

- a. Pengendalian Akses Fisik Pusat Data (Data Center): Akses fisik ke Data Center harus dibatasi dan dikendalikan dengan baik. Pintu Data Center harus selalu terkunci, dilengkapi dengan kartu akses dan atau biometric device. Ruang Data Center tidak boleh diberi label atau papan petunjuk (signing board) sehingga orang mudah mengenalinya. Bank harus memiliki logbook untuk mencatat tamu yang memasuki Data Center.
- b. Pengendalian Lingkungan Pusat Data: Kondisi lingkungan pemrosesan TI yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan gangguan pada operasi TI. Oleh karenanya, manajemen harus melakukan antara lain:
 1. mengawasi dan memantau faktor lingkungan data center, antara lain mencakup: sumber listrik, api, air, suhu, kelembaban udara.
 2. memastikan tersedianya sumber listrik yang cukup, stabil, dan tersedianya sumber alternatif untuk mengantisipasi tidak berfungsinya sumber listrik utama.
 3. memastikan Data Center memiliki detektor api dan asap serta pipa pembuangan air. Selanjutnya, Bank harus menyediakan sistem pemadam api yang memadai, baik yang dapat beroperasi secara otomatis maupun dioperasikan secara manual.
 4. menggunakan lantai yang ditinggikan (raised floor) untuk mengamankan sistem perkabelan dan menghindari efek grounding di Data Center.
- c. Kinerja Perangkat Keras dan Perangkat Lunak: Pemantauan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak minimal dilakukan setiap hari untuk memastikan seluruh perangkat tersebut beroperasi sebagaimana mestinya, misalnya server tetap dalam keadaan menyala, kapasitas database dan utilitas server tidak melampaui limit, dan fasilitas pendukung berfungsi dengan baik.

9. Kebijakan Pengelolaan Perubahan (Change Management)

Change Management adalah prosedur yang mengatur penambahan, penggantian, maupun penghapusan obyek di lingkungan produksi. Obyek dimaksud dapat berupa data, program, menu, aplikasi, perangkat komputer, perangkat jaringan, dan proses. Change Management harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengendalian Perubahan: Prosedur instalasi perubahan harus memperhatikan kelangsungan operasional pada lingkungan produksi, pengawasan, dan pengaturan pengamanan sistem informasi. Standar minimum yang diatur harus mencakup risiko, pengujian, otorisasi dan persetujuan, waktu implementasi, validasi setelah penginstalan dan back-out atau recovery.
-

- b. Patch Management: Dalam Change Management, Bank harus memiliki dokumentasi yang lengkap tentang instalasi patch yang dilakukan. Selain itu Bank harus memastikan bahwa Bank menggunakan versi perangkat lunak dengan release terbaru yang paling sesuai. Bank juga harus memiliki informasi terkini mengenai perbaikan produk, masalah keamanan, patch atau upgrade, atau permasalahan lain yang sesuai dengan versi perangkat lunak yang digunakan.
- c. Migrasi data: Migrasi data terjadi jika terdapat perubahan besar pada sistem aplikasi bank, atau terjadi penggabungan data dari beberapa sistem yang berbeda. Dalam hal terdapat migrasi data, Bank perlu memiliki kebijakan, prosedur mengenai penanganan migrasi data. Tahap-tahap yang perlu dilalui dalam melakukan migrasi data dimulai dari rencana strategis, manajemen proyek, Change Management, pengujian, rencana kontinjensi, back-up, manajemen vendor, dan post implementation review.

10. Kebijakan Penanganan Kejadian/Permasalahan

Prosedur penanganan kejadian/permasalahan harus mencakup perangkat keras, sistem operasi, sistem aplikasi, perangkat jaringan, dan peralatan keamanan.

Bank wajib memelihara sarana yang diperlukan untuk menangani permasalahan antara lain:

- a. Help Desk : Fungsi help desk agar cepat tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi oleh seluruh pengguna (user) di Bank dan menanganinya segera.
- b. Penanganan penggunaan Power User : Power user merupakan user id yang memiliki kewenangan sangat luas. Dalam rangka penanganan permasalahan, Bank wajib menetapkan prosedur penanganan power user agar penggunaanya tidak disalahgunakan.

11. Kebijakan Pengelolaan Data Warehouse (DWH)

Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur tentang pengendalian terhadap DWH. Pengendalian terhadap sistem yang digunakan untuk DWH pada dasarnya diperlakukan sama dengan pengendalian yang diterapkan terhadap sistem core banking dan sistem lain yang merupakan sumber data bagi DWH. Jika pada sistem aplikasi sumber, data tersebut diperlakukan sebagai data rahasia dan aksesnya terbatas, maka pada DWH juga harus diperlakukan demikian juga. Pembatasan akses ini tidak terbatas pada akses logical tetapi juga akses secara fisik terhadap sarana pendukung DWH dan laporan-laporan yang dihasilkannya. Adapun yang dimaksud dengan sistem mencakup sistem operasi, sistem aplikasi, dan sistem jaringan.

12. Kebijakan Pengelolaan Database

Kegagalan dalam mengelola dan mengamankan database secara tepat dapat mengakibatkan perubahan, penghancuran, atau pengungkapan informasi yang sensitif oleh user secara sengaja maupun tidak sengaja atau oleh pihak lain yang tidak berhak. Pengungkapan tanpa ijin terhadap

informasi yang rahasia dapat mengakibatkan risiko reputasi, hukum, dan operasional dan dapat menyebabkan kerugian finansial. Bank perlu memiliki klasifikasi sensitivitas atas informasi yang disimpan pada database sebagai dasar untuk melakukan pengawasan. Database yang menyimpan informasi rahasia membutuhkan pengendalian yang lebih ketat dibandingkan database yang menyimpan informasi yang tidak sensitif. Untuk itu, Bank wajib memiliki fungsi Database Administrator (DBA) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan database bank. Prosedur yang wajib dimiliki Bank terkait database adalah pengaksesan, pemeliharaan, penanganan permasalahan dan administrasi database.

13. Kebijakan Pengendalian Pertukaran Informasi (Exchange of Information)

Pengiriman informasi secara online maupun melalui media penyimpanan (seperti tape dan disk) harus dikelola secara memadai oleh Bank untuk mencegah risiko terkait pengamanan informasi. Bank harus memiliki prosedur pengelolaan transmisi informasi secara fisik dan logik antara lain:

- a. permintaan dan pemberian informasi oleh pihak internal dan eksternal;
- b. pengiriman informasi melalui berbagai media, seperti: hardcopy, tape, disk, e-mail, pos, dan internet. Pada bank besar dengan kompleksitas TI yang tinggi, manajemen harus mempertimbangkan pemisahan segmen WAN dan LAN dengan perangkat pengamanan (seperti firewall) yang membatasi akses dan lalu lintas keluar masuknya data.

14. Kebijakan Fungsi Library

Fungsi librarian bertanggung jawab untuk menginventarisir dan menyimpan seluruh perangkat lunak dan data yang tersimpan dalam berbagai media, antara lain tape dan disk. Disamping itu librarian juga menyimpan copy dari seluruh kebijakan dan prosedur seperti Data Center *run book* manual.

Dalam membuat kebijakan dan prosedur serta standar untuk library, Bank harus memperhatikan kecukupan prosedur penyimpanan (storage)/back-up dan pembuangan (disposal) media. Back-up data maupun program harus selalu dikinikan agar Bank dapat memastikan kemampuannya untuk memulihkan sistem, aplikasi, dan data pada saat terjadi bencana atau gangguan lainnya.

15. Kebijakan Fungsi Quality Assurance (QA)

Setiap pembuatan dan perubahan sistem harus melalui persetujuan fungsi QA sebelum dipindahkan (migrasi) ke lingkungan produksi sesuai dengan pedoman pengembangan sistem dan change management. Fungsi QA melakukan penilaian kualitas perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

16. Kebijakan Pengelolaan Hubungan dengan Pihak Penyedia Jasa

Apabila TI yang digunakan oleh Bank diselenggarakan oleh pihak lain maka Bank wajib memantau dan mengevaluasi kehandalan pihak penyedia jasa secara berkala baik yang menyangkut kinerja, reputasi penyedia jasa dan kelangsungan penyediaan layanan. Untuk itu, Bank harus menunjuk personil yang bertugas memantau layanan penyedia jasa TI dengan menggunakan prosedur yang paling kurang mencakup pemantauan layanan, pelaporan permasalahan dan dokumentasi yang terkait dengan layanan pihak penyedia jasa.

17. Kebijakan Penghapusan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak (Disposal)

Disposal meliputi penghapusan perangkat lunak, perangkat keras, dan data yang sudah tidak digunakan lagi atau yang masa retensinya telah habis. Source code versi lama yang sudah tidak dipakai lagi harus disimpan dengan indikasi yang jelas mengenai tanggal, waktu dan informasi lain ketika digantikan dengan source code versi terbaru.

Kegiatan yang dilakukan meliputi antara lain:

- a. memindahkan data dari sistem produksi ke media backup dengan mekanisme sesuai prosedur, termasuk prosedur uji coba dan backup;
- b. menyimpan dokumentasi sistem sebagai persiapan jika diperlukan untuk menginstall ulang suatu sistem ke server produksi;
- c. mengelola arsip data sesuai masa retensi;
- d. menghancurkan data yang habis masa retensinya.

PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI

Sistem Keamanan dan penyedia TI, Bank telah melakukan kontrak kerjasama Teknologi Sistem Informasi (TSI) tanggal 13 Mei 2015 dengan Nusantara Bona Pasogit dalam jual beli dan implementasi aplikasi NBP Sys.

PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR

PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA

Penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan Deposito, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri masih menggunakan produk lama yaitu Tabungan Mandiri, Tabungan Unggul, Tabungan Poin, dan Deposito. Untuk deposito pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, tahun 2024 deposito sebesar Rp 13.533.280 ribu sedangkan tahun 2023 Rp 14.302.757 ribu. Pencapaian deposito mengalami penurunan karena adanya pencairan deposito. Pencapaian Tabungan pada tahun 2024 mengalami peningkatan, tahun 2024 tabungan sebesar Rp 8.051.504 ribu dari tahun 2023 sebesar Rp 8.009.265 ribu. BPR juga perlu melakukan inovasi baru produk-produk tabungan sehingga dapat mengikuti perkembangan dan trend yang ada di masyarakat selain produk tabungan yang sudah ada.

PENGHIMPUNAN DANA DARI BANK LAIN

Dalam penghimpunan dana dari bank lain, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri mendapatkan dana dalam bentuk tabungan dan penempatan deposito antar bank sebesar Rp 9.701.933 dari BPR lain dan berupa pinjaman dari bank lain sebesar Rp 4.792.867 dana tersebut diantaranya dari Bank Jatim. Namun untuk menghindari biaya akibat dana *idle*, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri selalu memperhitungkan segala aspek dalam hal penghimpunan dana dari bank lain tersebut.

PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Dalam hal penyaluran pinjaman kepada masyarakat, pada tahun 2024 PT. BPR Mitra Banaran Mandiri mengalami penurunan sebesar Rp 28.127.966 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 29.908.959. Penyaluran pinjaman diberikan merupakan bagian penting dari bisnis BPR serta sumber utama pendapatan, BPR akan senantiasa mengoptimalkan strategi bisnis agar tidak menjadi hambatan dalam perolehan laba. Langkah – langkah yang harus diperhatikan adalah peningkatan pengawasan pada bagian kredit terhadap marketing kredit untuk lebih intensif dalam pengawasan kinerja dan optimalisasi petugas yang khusus menangani analisa kredit agar lebih ditingkatkan dan juga pola pemeliharaan kredit agar lebih diintensifkan lagi dikarenakan sampai dengan akhir Desember 2024 tingkat kredit dalam perhatian khusus yang dikelola oleh BPR memiliki jumlah yang cukup material. Kedepan setiap penyaluran kredit agar dilakukan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kualitas dapat terjaga.

Laporan Keuangan

NERACA

NERACA

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MITRA BANARAN MANDIRI

Tanggal 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023

Uraian	31-Des-2024	31-Des-2023
ASSET		
<i>Kas</i>	126.431.500	148.140.500
<i>Kas dalam valuta Asing</i>		
<i>Sertifikat Bank Indonesia</i>		
<i>Pendapatan bunga yang akan diterima</i>	755.376.741	929.773.119
<i>Penempatan pada Bank lain</i>	16.790.561.757	13.428.154.143
<i>Penyisihan Kerugian</i>	(33.484.593)	(32.286.032)
<i>Kredit yang diberikan (net)</i>	27.883.046.353	29.676.532.355
<i>Penyisihan kerugian</i>	(840.099.385)	(515.679.912)
<i>Agunan yang diambil alih</i>	362.943.889	147.943.889
<i>Aset tetap dan Inventaris</i>	1.600.117.341	1.564.614.341
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(1.188.358.089)	(1.111.964.534)
<i>Aset tidak berwujud</i>		
<i>Aset lain-lain</i>	217.348.504	352.736.504
Jumlah Aset	45.673.884.017	44.588.074.372

NERACA

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MITRA BANARAN MANDIRI

Tanggal 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023

Uraian	31-Des-2024	31-Des-2023
KEWAJIBAN		
<i>Kewajiban segera</i>	178.128.523	197.345.485
<i>Utang bunga</i>	135.726.214	133.139.883
<i>Utang pajak</i>	481.448	1.449.549
<i>Simpanan</i>	21.584.784.792	22.312.021.974
<i>Simpanan dari bank lain</i>	9.701.933.407	8.750.000.000
<i>Pinjaman diterima</i>	4.777.797.830	3.227.970.918
<i>Dana setoran modal – kewajiban</i>		
<i>kewajiban imbalan kerja</i>	16.455.128	111.455.128
<i>Pinjaman subordinasi</i>		
<i>Modal Pinjaman</i>		
<i>Kewajiban lain-lain</i>	47.604.505	167.223.379
Jumlah Kewajiban	36.442.911.847	34.900.606.316
EKUITAS		
<i>Modal</i>		
<i>Modal Disetor</i>	2.200.000.000	2.200.000.000
<i>Tambahan Modal Disetor</i>		
<i>Modal Sumbangan</i>		
<i>Total</i>	2.200.000.000	2.200.000.000
<i>Dana setoran modal ekuitas</i>		
<i>Laba/Rugi yang belum direalisasi</i>		
<i>Surplus revaluasi aset tetap</i>		
<i>Saldo Laba</i>		
<i>Cadangan umum</i>	440.000.000	440.000.000
<i>Cadangan khusus</i>		
<i>Belum ditentukan tujuannya</i>	6.590.972.171	7.047.468.056
<i>Total</i>		
Jumlah Ekuitas	9.230.972.171	9.687.468.056
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	45.673.884.017	44.588.074.372

LAPORAN LABA RUGI

PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI
PER 31 DESEMBER 2024 & 31 DESEMBER 2023

Uraian	31-Des-2023	31-Des-2022
PENDAPATAN OPERASIONAL		
<i>Pendapatan Bunga</i>	6.496.791.528	6.766.006.920
<i>Beban Bunga</i>	(2.301.805.875)	(1.923.325.214)
<i>Jumlah Pendapatan Bunga – Bersih</i>	4.194.985.653	4.842.681.706
<i>Pendapatan Operasional Lainnya</i>	411.365.822	228.944.797
<i>Jumlah Pendapatan Operasional</i>	4.606.351.475	5.071.626.503
BEBAN OPERASIONAL		
<i>Beban Penyisihan Kerugian/Penyusutan</i>	446.453.438	198.282.364
<i>Beban Pemasaran</i>	86.405.500	31.807.000
<i>Beban Umum dan Administrasi</i>	3.610.243.881	3.631.603.530
<i>Beban Lainnya</i>	52.559.584	58.896.894
<i>Jumlah Beban Operasional</i>	4.195.662.403	3.920.589.789
LABA (RUGI) OPERASIONAL	410.689.073	1.151.036.714
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
<i>Pendapatan Non Operasional</i>	45.810.000	101.239.149
<i>Beban Non Operasional</i>		
<i>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain</i>	45.810.000	101.239.149
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	456.499.073	1.252.275.863
Taksiran Pajak Penghasilan	(62.994.958)	(154.518.859)
Laba (Rugi) Neto	393.504.114	1.097.757.004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan Ekuitas PT BPR Mitra Banaran Mandiri yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

	Modal Disetor	Cadangan Umum	Blm Ditetapkan Tujuannya	Jumlah
Saldo 1 Januari 2023	2.200.000.000	440.000.000	6.949.711.052	9.589.711.052
Mutasi Saldo Laba				
-Deviden Tunai			(1000.000.000)	(1.000.000.000)
-Penambahan				
-Jasa Produksi				
Laba tahun berjalan			1.097.757.004	1.097.757.004
Saldo 31-12-2023	2.200.000.000	440.000.000	7.047.468.056	9.687.468.056
Mutasi Saldo Laba				
-Deviden Tunai			(850.000.000)	(850.000.000)
-Pengembalian Dana				
Setoran Modal				
-Jasa Produksi				
Laba tahun berjalan			393.504.114	393.504.114
Saldo 31-12-2024	2.200.000.000	440.000.000	6.590.972.171	9.230.972.171

LAPORAN ARUS KAS

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MITRA BANARAN MANDIRI

Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31-Des-2024	31-Des-23
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba neto	393.504.114	1.097.757.004
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi:		
Penyusutan aset tetap	105.368.553	100.773.293
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk :		
- Penempatan pada bank lain (selain giro)	1.198.560	2.743.704
- Kredit	324.419.474	195.538.660
Amortisasi		
- Pendapatan Provisi	15.026	18.242.083
- Pendapatan Administrasi	-	-
- Biaya Transaksi	12.478.704	24.868.658
Penurunan nilai agunan yang diambil alih	-	-
Laba penjualan aset tetap	-	-
Selisih kurs valuta asing	-	-
Perubahan aset dan kewajiban operasi :		
- Pendapatan bunga yang akan diterima	174.506.379	(24.779.810)
- Penempatan pada bank lain	(3.293.556.948)	1.148.928.958
- Kredit yang diberikan	1.780.992.273	669.408.913
- Agunan yang diambil Alih	(215.000.000)	
- Aset lain-lain	135.388.000	(240.592.500)
- Kewajiban segera	(19.216.963)	(152.150.010)
- Utang bunga	2.586.330	5.710.327
- Utang pajak	(968.101)	(81.180.869)
- Simpanan:		
- Tabungan	42.239.312	(352.265.147)
- Deposito berjangka	(769.476.493)	141.625.089
- Simpanan dari bank lain	951.933.407	1.550.000.000
- Pinjaman yang diterima		
- Kewajiban imbalan kerja	(95.000.000)	(8.357.436)
- Kewajiban lain-lain	(119.618.873)	(226.043.014)
Arus kas neto dari aktivitas operasi	(588.207.246)	3.870.227.904

Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(64.478.000)	(76.007.300)
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	-	-
Pembelian/penjualan Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(64.478.000)	(76.007.300)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pinjaman yang diterima	1.549.826.912	(2.162.858.896)
Dana setoran Modal Kewajiba	-	-
Penambahan Moda Disetor	-	-
Kewajiban Imbalan Kerja	-	-
Tambahkan Cadangan Umum	-	-
Koreksi Saldo Laba :		
Pembayaran Dividen	(850.000.000)	(1.000.000.000)
Dana Setoran Modal		
Penambahan Cadangan Umum		
Pengembalian dAna Setoran Modal-Kewajiban	-	-
Jasa Produksi (Bonus)	-	-
Koreksi Saldo Laba		
Laba Ditahan		
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	699.826.912	(3.162.858.896)
Kenaikan (Penurunan) Kas Dan Setara Kas	47.141.666	631.361.708
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode	2.613.624.675	1.982.262.967
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	2.660.766.341	2.613.624.675
Kas dan Setara Kas terdiri dari :		
- Kas	126.431.500	148.140.500
- Giro Pada Bank Lain	2.534.334.841	2.465.484.175
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.660.766.341	2.613.624.675

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Komitmen dan Kontinjensi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
KOMITMEN		
Tagihan Komitmen		
Kredit kepada Nasabah yg blm ditarik		
Fas. Pinj diterima yg belum digunakan	7.133.430	-
Fas. Pinj diberikan yg belum digunakan	<u>536.300.000</u>	<u>231.975.000</u>
JML TAGIHAN (KEWAJIBAN) KOMITMEN	<u>543.433.430</u>	<u>231.975.000</u>
KONTINJENSI		
Tagihan Kontinjensi	-	-
Pendapatan Bunga dlm Penyelesaian	1.598.042.191	1.138.990.992
Pendapatan Bunga dlm Penyelesaian Hapus Buku	163.879.204	27.710.632
Asset Produktif yang Dihapus Buku	54.973.848	90.448.540
Lain-lain	-	-
JUMLAH TAGIHAN DAN KONTINJENSI	<u>1.816.895.243</u>	<u>1.257.150.164</u>

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **M. Tri Setyadi**
Alamat Kantor : Jl. Raya Timur KM.16/09, Kec. Sambung Macan,
Kab. Sragen
Alamat Domisili sesuai KTP atau Identitas Lain : Jegon RT.003 RW.002, Pajang, Laweyan, Surakarta
No. Telepon : 0856 4702 0155
Jabatan : **Direktur Utama**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama **PT BPR Mitra Banaran Mandiri** yang berkedudukan di Sragen (Selanjutnya disebut Bank) dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan Keuangan Tahunan PT BPR Mitra Banaran Mandiri Tahun 2024 disusun sesuai kebenaran data dan/atau informasi Laporan Keuangan Tahunan BPR;
2. Bertanggungjawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan POJK mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dan
3. Hasil penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan POJK mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sragen, 17 April 2024



M. Tri Setyadi
Direktur Utama



Nomor: 00061/3.0461/AU.2/07/1321-1/1/IV/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth;
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI** terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI** tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap BPR berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan **PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI** untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh auditor independen lain dalam laporannya nomor: 00029/3.0402/AU.2/07/1391-1/1/IV/2024 yang diterbitkan pada tanggal 02 April 2024 dengan opini wajar tanpa pengecualian.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BPR dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BPR.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal BPR.



- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BPR untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BPR tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan



Dr. Kurnia, Ak., CA., CPA

Izin Akuntan Publik No. AP. 1321

Bandung, 28 April 2025

